

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aggriani Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Asshiddiqie Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- , 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta; Konpress.
- , 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Bintoro R. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Bo'a Fais Yonas. 2017. *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen: Kewenangan Konstitutif MPR dan Kebutuhan Amandemen Ke Lima UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan; Bitra Indonesia.
- Efendi A'an dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta Timur; Sinar Grafika.
- Efendi Mahrizal. 2003. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta; Bina Aksara
- Fachruddin Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- Haryono. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang; Bayumedia.
- HR Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara. 1st edition*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- , 2017 *Hukum Administrai Negara*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- HS Husaimi dan Marjan Miharja. 2016. *Penyalahgunaan Wewenang Terkait Dengan Prosedur Penangkapan Terhadap Korban Yang Salah Tangkap*, Pasuruan; Qiara Media.
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbiana. 2013. *Penerapan Tori Hukum Pidana Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta; PT Raja Grafindo

Persada.

- Huda Ni'maL. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang; Setara press
- , 2019. *Presiden Dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta; FH UII Press.
- Ilmar Aminuddin. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta; Prenadamedia Group.
- , 2021. *Hukum Tata Pemerntahan*, Makassar: Unhas Pers.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Ismail Nurhasan. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Yogyakarta; Universitas Gajah Mada.
- Jamaludin Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi PerDesaan*, Surakarta; Pustaka Setia.
- Johan Teuku Saiful Bahri. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta; Deepublish.
- Juliantara Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Yogyakarta; Lappera Pustaka Utama.
- Manan Bagir. 1999. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta; FH UII Press.
- , 2001. *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Yogyakarta; Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Marzuki Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Kencana.
- Maschab Mashuri. 2013. *Politik Desa di Indonesia*, Yogyakarta; PolGov Fisipol UGM.
- Mertokusumo Sudikno. 2004 *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta; Liberty.
- Miftah Thoha. 2002. *Pembinaan Yang Efektif*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB; Mataram University Press
- Mulyosudarmo Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya; Universitas Airlangga.
- Murhaini Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan*

Daerah. Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Nurcholis Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta; Grasindo.

----, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta; Erlangga.

Pamudji S. 1985. *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*, Jakarta; Bina Aksara.

Poernomo Freddy. 2020. *Hukum Pemerintah Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Surabaya; Air Langga University Press.

Pradana Syafa'at Anugrah. 2022. *Vista Pendidikan dalam Ragangan Hukum Pemerintahan Daerah: Sebuah Konsep Filosofis dalam Rangka Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, Pare-Pare; Sampan Institute.

Pramukti Angger Sigit and Meylani Chahyaningsi. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia.

Rahardjo Satjipto. 1999. *Pengantar sosiologi peDesaan dan pertanian*, Yogyakarta; UGM Press.

----, 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Ridwan Juniarso dan A. Sodik Sudrajat. 2019. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung; Nuansa Cendekia.

Santoso. 1995. *Pembinaan Dalam Organisasi*, Jakarta; Gramedia Pustaka.

Sarip. 2018. *Hukum Tata Negara Materil*, Cirebon: ElsiPro.

Siagian Sondang P. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Jakarta; Rineka Cipta.

Solekhan Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang; Setara Press.

Sugarto Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung; PT Ravika Adimatama.

Sutoro Eko. 2008. *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*, Yogyakarta; Institute for Research and Empowermen.

Suwito. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding*, Surabaya; CV. Jagad Media Publishing.

- Syafrudin Ateng dan Suprin Na'a. 2010. *Republik Desa: Pergaulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung; Alumni.
- T, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Wibowo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta; Kencana.
- Theresia Aprillia. at al., 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung; Alfabeta
- Tjandra W Wirawan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Wicaksono Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*, Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Widjaja H.A.W. 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Zed Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*, cetakan ketiga. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tesis

- Eka Cahyanti Sri Arinda. 2022. *Kewenangan Pengawasan Terhadap Alokasi Dana Desa*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Jurnal dan Karya Tulis Lainnya

- Anggraini, Rooza Meilia, "Harmonisasi Hukum Pengaturan Desa Oleh Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Pasca Berlakunya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Legal Spirit*, vol. 1, no. 2, 2017, pp. 101–8.
- Asrul, Asrul, "Politik Hukum Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Penguatan Hak Ulayat", *Katalogis*, vol. 5, no. 3, 2017.
- Ayunita, Khelda, "Pengujian peraturan Desa dalam sistem peraturan perUndang Undangan", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 3, no. 2, 2016, pp. 131–7.
- Fadillah, Ranti et al., "Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, vol. 2, no. 01, 2024.
- Hadi, Syofyan and Tomy Michael, "Principles of defense

(Rechtmatigheid) in decision standing of state administration”, *Jurnal Cita Hukum. Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta*, vol. 5, no. 2, 2017, pp. 383–400.

Hamidi, Jazim and Mustafa Lutfi, “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 6, no. 1, 2009, pp. 39–78.

Hanafi, Andhi Sukma, “Pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pembangunan zona integritas pada Kementerian Perindustrian”, *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, vol. 4, no. 1, 2020, pp. 31–7.

Haryatama, Norman and Indarja Untung Dwi Hananto, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014-2019”, *Diponegoro law journal*, vol. 5, no. 3, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016, pp. 1–21.

Herdiana, Dian, “Urgensi Revisi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol*, vol. 50, no. 1, 2020, pp. 245–66.

Luthfia, Agusniar Rizka, “Menilik urgensi Desa di era otonomi daerah”, *Journal of Rural and Development*, vol. 4, no. 2, 2013.

Luthfy, Riza Multazam and Muhammad Imam Dhiya’ul Haq, “Dualisme Kewenangan Pembentukan Hukum di Bidang Desa”, *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 10–20.

Mardeli, Iis, “Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, UAJY, 2015, pp. 1–29.

Monterio, Josef Mario, “Tanggung Jawab Presiden Atas Kebijakan Menteri yang Menimbulkan Korupsi Berdasarkan Sistem Presidensial dan Teori Kewenangan”, *Kertha Patrika*, vol. 39, no. 2, 2017.

Ningsih, Surya and Silsila Asri, “Tumpang Tindih Regulasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari)”, *Ensiklopedia Social Review*, vol. 3, no. 3, 2021, pp. 381–92.

Pakaya, Jefri S., “Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 13, no. 1, 2016, pp. 73–84.

Pamungkas, Bambang Adhi, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 2, no. 2, 2019, p. 224 [<https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>].

- Pradana, S.A., "Penafsiran Kewenangan Dinas dan Badan dalam Struktur Pemerintah Daerah", *Jurnal Magister Hukum Udayana (JMHU)*, vol. 12, no. 2, 2023, pp. 422–39.
- Rabihin, Abdi and Galang Asmara, "Harmonisasi Kewenangan antara Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian dalam Negeri dalam Pembangunan Desa", *Jurnal Education and Development*, vol. 10, no. 1, 2022, pp. 649–55.
- Rafsanzani, Hasyemi, "Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 1, no. 4, 2013.
- Ridwan and Isman, "Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Pasang Surut Kekuasaan Adat Di Tengah Hegemoni Negara", *Jurnal Niara*, vol. 12, no. 1, 2019, pp. 1–8 [<https://doi.org/10.31849/nia.v12i1.2137>].
- Ridwansyah, Muhammad, "Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, vol. 13, no. 2, 2016, pp. 278–98.
- Retnowati Endang, et, al., 2022, Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa Melalui Deregulasi Kelembagaan Yang Mengurus Desa, *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Volume 10 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, hlm. 44.
- S, Rilo Pambudi, Chatrine Sabendi Putri, and Pery Rehendra Sucipta, "Eksistensi Lembaga Khusus Regulasi dalam Pengharmonisasian Peraturan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 19, no. 4, 2022.
- Sarip, Nur Rahman, and Rohadi, "Hubungan Kemendagri dan Kemendes dalam Tata Desa dan Administrasi Desa", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 3, no. 2, 2020, pp. 81–97.
- Sugiman, Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Binamulia Hukum*, vol. 7, no. 1, Universitas Krisnadwipayana, 2018, pp. 82–95.
- Teguh, Prio and Baiq Aprimawati, "Penyusunan Regulasi Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Konstituen*, vol. 1, no. 2, 2019, pp. 47–66.
- Wijaya, Endra et al., "Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 13, no. 2, 2019, pp. 165–84.
- Zaini, Ahmad, "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM", *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 13–48.

Sumber Internet

Sujito Arie, Mencegah Politisasi Dana Desa, Majalah Detik, Edisi 163, 12-18 Januari 2015

Sekretaris Kabiner Republik Indonesia. 2015. *Hari Ini, Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Masalah Desa*", [setkab.go.id](https://setkab.go.id/hari-ini-presiden-jokowi-pimpin-rapat-terbatas-bahas-masalah-Desa/).
<https://setkab.go.id/hari-ini-presiden-jokowi-pimpin-rapat-terbatas-bahas-masalah-Desa/>.

Suryanto, 2014. *Kementerian Desa tetapkan sembilan program prioritas*. [antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/463740/kementerian-Desa-tetapkan-semilan-program-prioritas).
<https://www.antaranews.com/berita/463740/kementerian-Desa-tetapkan-semilan-program-prioritas>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam
Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Deaa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kemeterian Desa Pemabangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Wawancara

Nur Ilahi, Pendamping Desa Kec. Tammerodo, Kab. Majene

Nuril Isnain, Pendamping Desa Kec. Sendana, Kab. Majene